

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP WANITA HAMIL SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI PUTUSAN NOMOR
169/Pid.Sus/2023/PN.Kgn**



Diajukan oleh

MUHAMMAD NAUFAL FAWWAZ ZAHRON

NIM. 2110211310060

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI Banjarmasin,**

Maret 2025

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP WANITA HAMIL SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI PUTUSAN NOMOR
169/Pid.Sus/2023/PN.Kgn**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD NAUFAL FAWWAZ ZAHRON
NIM. 2110211310060**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

**PEMIDANAAN TERHADAP WANITA HAMIL SEBAGAI
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI
PUTUSAN NOMOR 169/Pid.Sus/2023/PN.Kgn**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD NAUFAL FAWWAZ ZAHRON

NIM. 2110211310060

**PROGRAM SARJANA PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI Banjarmasin,
Maret 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMIDANAAN TERHADAP WANITA HAMIL SEBAGAI
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI
PUTUSAN NOMOR 169/Pid.Sus/2023/PN.Kgn**

Diajukan oleh

MUHAMMAD NAUFAL FAWWAZ ZAHRON

NIM.2110211310060

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 dan dinyatakan
Memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama



Dr. H. Rudy indrawan, S.H., M.H.

NIP. 197609192002121003

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMIDANAAN TERHADAP WANITA HAMIL SEBAGAI
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI
PUTUSAN NOMOR 169/Pid.Sus/2023/PN.Kgn**

Diajukan oleh

MUHAMMAD NAUFAL FAWWAZ ZAHRON

NIM. 2110211310060

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 227/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : **08 MAY 2025**

Disahkan

Dekan,



Dr. Aclanad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin 13 Januari 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
mangkurat

Nomor : 97 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Naufal Fawwaz Zahron
NIM : 2110211310060
Tempat/Tgl.Lahir : Hulu Sungai Selatan, 16 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana S1
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**PEMIDANAAN TERHADAP WANITA HAMIL SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI PUTUSAN NOMOR
169/Pid.Sus/2023/PN.Kgn**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Naufal Fawwaz Zahron
NIM. 2110211310060**

MOTO

"Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain" (HR. Imam Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta Alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Untuk kedua orang tua, **Tedy Soetedjo** dan **Noor Khalisah** yang selalu memberi dukungan serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya. Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Untuk kakakku **Zainab Maharani Nurzahrah Rizqi** dan adikku **Zhafirah Badriyyah Ghaniyyah Rizqi**, yang senantiasa memberian dukungan dan doa kepada Penulis. Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi saya Bapak **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

Engkau merupakan panutan kami semua ...

RINGKASAN

Muhammad Naufal Fawwaz Zahron, Desember 2024. **PEMIDANAAN TERHADAP WANITA HAMIL SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI PUTUSAN NOMOR 169/PID.SUS/2023/PN KGN**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Pada kasus tindak pidana narkotika yang menjerat seorang perempuan adalah kasus terpidana Dessy di kabupaten Hulu Sungai Selatan, kasus tersebut sangat menyayat hati yang dimana terpidana pada saat diamankan sampai dengan penjatuhan hukuman ternyata seorang single parents dan dalam kondisi sedang hamil anak ke 2, terdapat masalah yang sangat kompleks sehingga terpidana sampai mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Berdasarkan putusan tingkat pertama yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kgn, berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dessy mendapatkan pemidanaan penjara 1 tahun dan 2 bulan. Hakim juga dinilai memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terpidana tidak mempertimbangkan hati Nurani apalagi terpidana dalam kondisi tertentu yaitu sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan lebih 4 bulan, hakim cenderung memutuskan suatu perkara hanya berlandaskan pada dakwaan yang diberikan oleh jaksa, terlihat bahwa kasus telah memenuhi alasan yang dapat dijatuhi hukuman dengan penjatuhan hukuman tertentu, namun tidak terdapat adanya keringanan di dalam hukuman yang dijatuhkan hakim kepada Dessy yang melakukan tindak pidana narkotika. Meskipun hakim ketua yang memimpin persidangan berbeda pendapat (dissenting opinion) dari 2 hakim anggota lainnya yang menyatakan bahwa seharusnya dapat diselesaikan dengan restorative justice agar bayi dalam kandungan dapat lahir tidak dalam tahanan. Disarankan kepada hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika khususnya perempuan dalam keadaan tertentu sesuai dengan keadilan & kemanfaatan mengingat perbuatan yang dilakukan terpidana yaitu Dessy yang juga sebagai korban akibat adanya peredaran narkotika, diharapkan juga agar hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada saat menjatuhkan hukuman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi terdakwa yang sedang hamil dapat menjadi dasar peringan pidana dan mengetahui Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.Kgn sudah sejalan dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, juga dilakukan dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan pada fakta dan pertimbangan hukum, terdakwa Dessy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menurut pendapat penulis kondisi terdakwa yang sedang hamil bisa dijadikan dasar peringan pidana, akan tetapi tidak diatur secara khusus yang bisa menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara untuk memberikan keringanan kepada terdakwa wanita yang dalam kondisi hamil. Namun hal-hal yang meringankan juga harus diperhatikan hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya memberatkan saja, karena didalam hukum pidana dalam tujuan pemidanaan tidak hanya "pembalasan" akan tetapi juga ada rehabilitasi mengingat terpidana adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Meskipun terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri tapi ada anak yang di dalam kandungannya yang mana harus di perhatikan hal ini sesuai dengan Pasal 52 Undang- Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi hukum, bahkan sejak dalam kandungan. Berdasarkan pasal tersebut bisa dijadikan pedoman hakim dalam memutuskan perkara yang mana kondisi wanita itu sedang hamil. Karena melindungi anak yang lahir atau belum lahir merupakan tugas semua termasuk negara, yang di wakili oleh pemerintah. Kedepannya agar peraturan mengenai pemidanaan juga mengatur mengenai penerapan pemidanaan terhadap wanita.

Berdasarkan kronologis pada Putusan nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kgn majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan. Dalam perkara Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kgn menurut penulis makin lebih mengedepankan pembalasan atau akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa daripada rasa keadilan yang seharusnya ditempatkan kepada terdakwa. Terdakwa dalam menjalani proses persidangan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan vonis terdakwa berada dalam tahanan hal ini merupakan penderitaan bagi terdakwa dengan kondisi hamil, seharusnya hakim memutuskan terdakwa untuk direhabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan narkotika karena mau bagaimanapun terdakwa tetaplah seorang korban. Hal ini dilakukan agar hukuman tersebut bermanfaat untuk terdakwa sesuai dengan Pasal 127 ayat 3 UU Narkotika yang berbunyi "Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dan tentunya harus dilakuan assessment terhadap terdakwa karena pidana penjara tidak menjamin terdakwa merasa jera (efek jera terhadap terdakwa) sedangkan rehabilitasi setidaknya dapat membantu terdakwa lepas dari ketergantungan narkotika. Sebagaimana tentang konsep Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan antara individu terpidana dan masyarakat (Re-integrasi sosial). Oleh karena itu Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kgn tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan.

Muhammad Naufal Fawwaz Zahron, Desember 2024. **PEMIDANAAN TERHADAP WANITA HAMIL SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI PUTUSAN NOMOR 169/PID.SUS/2023/PN KGN.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kasus terpidana Dessy, seorang perempuan hamil yang terjerat dalam tindak pidana narkoba. Penjatuhan hukuman penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dinilai tidak mempertimbangkan kondisi khusus terdakwa, yang merupakan seorang single parent dengan kehamilan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi apakah kondisi hamil dapat menjadi dasar peringan pidana dan menilai kesesuaian putusan dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dessy terbukti bersalah, kondisi hamilnya seharusnya dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam penjatuhan hukuman. Penulis merekomendasikan penerapan prinsip restorative justice agar tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan rehabilitasi bagi terdakwa yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia serta mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam penegakan hukum terhadap perempuan, terutama dalam konteks kehamilan dan perlindungan anak.

Kata kunci (keyword) : Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkoba, Restorative Justice, Kehamilan, Keadilan Sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

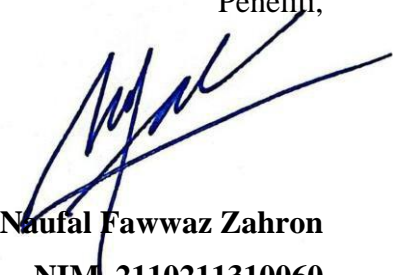
Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan lewat kegiatan pembelajaran selama menjalani perkuliahan.
4. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil untuk penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, teman-teman satu bimbingan skripsi, serta sahabat-sahabat penulis, dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021 yang telah berproses bersama selama perkuliahan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan kepada segala pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Banjasin,

Peneliti,



Muhammad Naufal Fawwaz Zahron

NIM. 2110211310060



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Keaslian Penulisan.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	14
A. Dakwaan.....	14
B. Fakta Hukum	23
C. Amar Putusan	43
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	46
A. Pengertian Hukum Pidana.....	46

B. Tujuan Hukum Pidana.....	47
C. Tindak Pidana.....	48
D. Pertanggungjawaban Pidana	49
E. Tujuan Pemidanaan Relatif.....	57
F. Pertimbangan Hakim	61
BAB IV PEMBAHASAN	66
A. Kondisi Terdakwa Yang Sedang Hamil Dapat Menjadi Dasar Peringan Pidana	66
B. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kgn Sudah Sejalan Dengan Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan.....	73
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

